

Evaluasi Pelaksanaan Program Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air di Bidang Irigasi Kecil

Dwi Nur Cahyo

Diterima : 3 April 2017

Disetujui : 29 Mei 2017

ABSTRACT

Acceleration and extension of water resources infrastructure development program in small irrigation (P4 ISDA IK) is a program to reduce the burden on poor people's lives as a result of changes in the amount of oil fuel subsidy. Implementation program of P4 ISDA IK simultaneously to support national food security programs and efforts to increase economic capacity and social welfare through the empowerment of farming communities in tissue repair of small irrigation in rural areas. This study aimed to evaluate the implementation of the program to the beneficiary of P4 ISDA IK. Analysis of community participation carried out using quantitative methods to search for a number of variables that can be obtained from several reviews of a theory. From that variables then conducted a descriptive analysis of quantitative and analytical weighting. While the analysis of the performance of Water User Associations (P3A) carried out using Importance Performance Analysis methods (IPA). Based on field studies and processing questionnaire the results showed that the level of participation remained at the consultation level. Regarding the performance of P3A showed that performance indicators that are already well is : P3A have Statutes/Bylaws (AD/ART), P3A has a legal entity, there is an integrity pact and the signing of the contract, Ease requirements to receive P4 ISDA IK, Ease of distribution of funds disbursement, the preparatory work, procurement of materials and goods, construction execution.

Keywords : Evaluation, irrigation, community participation, performance of P3A, P4 ISDA IK

ABSTRAK

Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air di bidang Irigasi Kecil (P4 ISDA IK) merupakan sebuah program guna mengurangi beban hidup masyarakat miskin akibat perubahan besaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Pelaksanaan program P4 ISDA IK sekaligus mendukung program ketahanan pangan nasional dan upaya peningkatan kemampuan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat petani dalam perbaikan jaringan irigasi kecil di wilayah pedesaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program tersebut terhadap penerima dana P4 ISDA IK. Analisa mengenai partisipasi masyarakat dilakukan menggunakan metode kuantitatif dengan mencari beberapa variable yang dapat diperoleh dari beberapa tinjauan teori. Dari beberapa variable tersebut kemudian dilakukan analisis deskriptif kuantitatif dan analisis pembobotan. Sementara analisa mengenai kinerja Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dilakukan dengan metode Importance Performance Analysis (IPA). Berdasarkan studi lapangan dan pengolahan hasil kuesioner diperoleh bahwa tingkat partisipasi masyarakat masih berada pada tingkat consultation. Mengenai kinerja dari P3A didapatkan hasil bahwa indikator kinerja yang sudah berjalan dengan baik antara lain : P3A memiliki Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), P3A memiliki badan hukum, Terdapat pakta integritas dan penandatanganan kontrak, Kemudahan persyaratan penerima P4 ISDA IK, Kemudahan penyaluran pencairan dana, Pekerjaan persiapan, Pengadaan material dan barang, Pelaksanaan konstruksi.

Kata Kunci : Evaluasi, irigasi, partisipasi masyarakat, kinerja P3A, P4 ISDA IK

¹Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, DKI Jakarta
Kontak Penulis : dwinurcahyo@yahoo.com

PENDAHULUAN

Di Indonesia kemiskinan selalu terkait dengan sektor pekerjaan di bidang pertanian untuk daerah pedesaan dan sektor informal di daerah perkotaan. Menurut Chatani dalam Anggriani (2012), pada tahun 2007 pekerja miskin banyak bekerja di sektor pertanian dimana sektor pertanian ini terdapat di pedesaan (60,3%) dan sektor jasa dominan terdapat di perkotaan (8,5%). Hal ini sejalan dengan data Bappenas (2010) yang menyatakan bahwa sebanyak 72% penduduk pedesaan berkerja di sektor pertanian.

Di Indonesia sendiri terdapat 7,2 juta Ha daerah irigasi. Yang mana, lebih dari 80 persen produksi padi di Indonesia berasal dari lahan irigasi tersebut. Namun, walau mengingat betapa pentingnya peran irigasi dalam pembangunan pertanian dan ketahanan pangan, lebih kurang seluas 2,6 juta Ha daerah irigasi dalam kondisi rusak, baik itu rusak ringan maupun rusak berat. Degradasi kinerja irigasi merupakan ancaman nyata terhadap masa depan pasokan pangan nasional. Dampak kemunduran kinerja irigasi bersifat langsung dan tidak langsung. Dampak langsung adalah turunnya produktivitas, turunnya intensitas tanam, dan meningkatnya risiko usahatani. Dampak tidak langsung adalah melemahnya komitmen petani untuk mempertahankan ekosistem sawah karena buruknya kinerja irigasi mengakibatkan lahan tersebut kurang kondusif untuk usahatani padi (Sumaryanto, dkk. 2006).

Mengingat begitu pentingnya irigasi baik itu pembangunan maupun rehabilitasi jaringan irigasi dalam rangka usaha meningkatkan pembangunan di sektor pertanian untuk mencukupi kebutuhan pangan, Pemerintah pada tahun 2013 melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum melaksanakan sebuah Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air di bidang Irigasi Kecil (P4 ISDA IK). Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum (KEPMEN PU) Nomor 328/KPTS/M/2013 tentang Penetapan Desa Penerima P4 ISDA IK, Desa penerima bantuan sosial P4 ISDA IK ditetapkan sebanyak 4000 desa yang tersebar di 254 Kabupaten di 28 provinsi. Yang kemudian terjadi penambahan desa menjadi 5.010 desa penerima P4 ISDA IK berdasarkan KEPMEN PU Nomor 396/KPTS/M/2013 yang tersebar di 280 kabupaten di 31 provinsi di Indonesia.

Dalam setiap program kegiatan diperlukan tahap evaluasi mengingat segala upaya telah dilakukan untuk pelaksanaan program tersebut, mulai dari perencanaan, pelaksanaan program dan dana yang dialokasikan. Demikian pula dalam pelaksanaan program P4 ISDA IK ini juga diperlukan evaluasi guna mengetahui sejauh mana indikator keberhasilan program tercapai. Dengan demikian penggunaan segala sumber daya tersebut tidak sia-sia. Maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji Pelaksanaan Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air di bidang Irigasi Kecil (P4 ISDA IK) di Desa Kalisari Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang.

METODE PENELITIAN

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data terdiri dari data primer melalui kuesioner dan wawancara kepada 100 orang responden, Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi literatur, survei instansi dan media internet.

Bentuk dan Tingkat Partisipasi Masyarakat

Untuk mengetahui bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan P4 ISDA IK digunakan analisis deskriptif kuantitatif dengan statistik sederhana dengan menghitung distribusi frekuensinya. Bentuk partisipasi masyarakat diketahui dari persentase bentuk partisipasi yang dilakukan dalam pengelolaan P4 ISDA IK berdasarkan indikator-indikator yang ada dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat maka akan diukur dengan menggunakan metode kuantitatif melalui penjumlahan skor dari indikator-indikator yang telah ditetapkan. Yang kemudian, masing-masing indikator dikaitkan dengan tingkat partisipasi masyarakat yang digunakan oleh Makoto Inoue yang terbagi dalam enam tingkatan partisipasi masyarakat.

Penilaian Kinerja P3A Sumber Tani

Analisa mengenai kinerja P3A dilakukan dengan metode *Importance Performance Analysis* (IPA). IPA menyatukan pengukuran faktor tingkat kinerja (*performance*) dan tingkat kepentingan (*importance*) yang kemudian digambarkan dalam diagram dua dimensi yaitu diagram *importance-performance* untuk mendapatkan usulan praktis dan memudahkan penjelasan data. Grafik IPA dibagi menjadi empat buah kuadran berdasarkan hasil pengukuran importance-performance yaitu *Concentrate Here*, *Keep Up With the Good Work*, *Low Priority*, dan *Possibly Overkill*.

KAJIAN TEORI

Evaluasi

Menurut Dunn (2000) Evaluasi adalah kegiatan menilai mencari terobosan baru untuk penyempurnaan. Evaluasi sekaligus sebuah proses analisis yang menekankan pada penciptaan premis-premis nilai yang memberikan penilaian terhadap kinerja sebuah program, kebijakan dan atau sebuah kegiatan. Proses evaluasi sekaligus memberikan tanggapan terhadap sebuah pertanyaan, "Apa perbedaan yang dibuat?". Artinya evaluasi merupakan analisa terhadap sebuah fakta dan tanggapan yang dihasilkan ketika sebuah program atau kebijakan dilaksanakan.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Bentuk-bentuk partisipasi sendiri dijelaskan oleh Ericson dalam Slamet (1994) terbagi atas tiga tahap, yaitu: (1) Partisipasi di dalam tahap perencanaan (*idea planing stage*); (2) Partisipasi di dalam tahap pelaksanaan (*implementation stage*); (3) Partisipasi di dalam pemanfaatan (*utilitazion stage*). Sementara itu Makoto Inoue (2004) menjelaskan bahwa tingkat partisipasi masyarakat terbagi menjadi enam, yaitu: (1) *Informing* (Informasi); (2) *Information Gathering* (Pengumpulan Informasi); (3) *Consultation* (Konsultasi); (4) *Conciliation* (Konsiliasi), (5) *Partnership* (kerjasama); (6) *Self-mobilization* (Penggerakan Diri).

Kinerja

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Kinerja juga dapat dikatakan sebagai perilaku berkarya, penampilan, atau hasil karya. Karena

itu kinerja merupakan bentuk yang multidimensional, sehingga cara mengukurnya sangat bervariasi tergantung dari banyak faktor (Pasaribu dkk, 2012).

GAMBARAN UMUM

Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional dan upaya peningkatan kemampuan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat tani dalam rehabilitasi irigasi kecil secara partisipatif di wilayah pedesaan, Kementerian Pekerjaan Umum Melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air melaksanakan Program Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air Bidang Irigasi Kecil (P4 ISDA IK).

Maksud dari pelaksanaan P4 ISDA IK adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat tani dalam kegiatan rehabilitasi irigasi kecil sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan prinsip kemandirian. Sementara tujuan dari P4 ISDA IK adalah:

1. Terlaksananya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat tani dalam kegiatan rehabilitasi irigasi kecil; dan
2. Terlaksananya rehabilitasi terhadap kondisi dan fungsi prasarana irigasi kecil

Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan P4 ISDA IK adalah:

- a. Partisipatif: Masyarakat tani diberi kesempatan, secara aktif dalam pelaksanaan kegiatan.
- b. Transparansi: Manajemen dan administrasi penggunaan dana diketahui oleh seluruh anggota masyarakat tani yang terlibat.
- c. Akuntabilitas: Kegiatan program yang dilaksanakan oleh masyarakat tani harus dapat dipertanggungjawabkan, dalam hal ketepatan sasaran, waktu pembiayaan dan mutu pekerjaan.
- d. Berkesinambungan: Hasil kegiatan yang didanai program dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat tani secara berkelanjutan (sustainable), sehingga dapat dilanjutkan dan dikembangkan oleh perkumpulan petani pemakai air.

Gambaran Pelaksanaan P4 ISDA IK di Desa Kalisari

Kegiatan P4 ISDA IK dimulai dengan sosialisasi melalui musyawarah desa yang dilakukan oleh Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) dengan mengundang masyarakat tani yang berada di Desa Kalisari. Musyawarah desa tersebut dilakukan untuk merumuskan masalah-masalah yang terdapat di lokasi pelaksanaan kegiatan dan merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan bantuan sosial yang diterima. Setelah dilakukan musyawarah desa tahap selanjutnya adalah menyusun rencana kerja kelompok penerima manfaat (RKKPM) guna merencanakan kegiatan rehabilitasi irigasi serta membuat anggaran biaya yang akan dilaksanakan oleh P3A Sumber Tani selaku KPM dari P4 ISDA IK dimana dalam penyusunannya P3A di damping dan dipandu oleh TPM terkait.

Tahap pelaksanaan dimulai setelah RKKPM yang dibuat oleh KPM disetujui dan diverifikasi oleh Konsultan Manajemen Balai (KMB) dan pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang selanjutnya dilakukan penandatanganan pakta integritas dan surat perjanjian kerja sama (SPKS) antara KPM dengan satuan kerja Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (satker PJPA). Pencairan dana bantuan sosial P4 ISDA IK terbagi menjadi tiga tahap yaitu tahap I sebesar 40% dari total bantuan sosial yang telah ditetapkan sebesar Rp. 154.844.075,- yaitu sebesar Rp. 61.937.629,-. Pada tahap I ini P3A Sumber Tani menggunakan dana tersebut untuk melaksanakan pekerjaan persiapan, pekerjaan bangunan pelengkap, dan sebagian pekerjaan saluran. Pada tahap II dan III P3A Sumber Tani selaku KPM mendapatkan total pencairan dana

sebesar 60 % dari total bantuan sosial yang telah ditetapkan sebesar Rp. 154.844.075,- yaitu sebesar Rp. 92.906.445,-. Pada tahap ini P3A Sumber Tani menggunakan dana tersebut untuk melaksanakan pekerjaan persiapan, dan sebagian pekerjaan saluran.

Bentuk dan Tingkat Partisipasi Masyarakat

1. Analisa Bentuk Partisipasi Masyarakat pada Tahap Perencanaan

Dari hasil kuesioner yang disebarakan kepada warga berkaitan dengan berpartisipasi pada tahap perencanaan pembangunan prasarana lingkungan melalui P4 ISDA IK, seluruh responden yang ditemui menyatakan bahwa mereka ikut berpartisipasi dalam tahap perencanaan pelaksanaan P4 ISDA IK di lingkungan mereka. Tingginya animo responden dalam berpartisipasi, agar warga mampu mengontrol keputusan-keputusan yang mempengaruhi nasib mereka (Slamet, 1994).

TABEL 1
BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT PADA TAHAP PERENCANAAN

| Bentuk Partisipasi | Jumlah Responden | |
|--------------------------------------|------------------|--------------|
| | Frekuensi | Prosentase |
| Aktif mengikuti pertemuan | 68 | 68 % |
| Aktif menyampaikan usulan/saran | 30 | 30 % |
| Terlibat dalam pengambilan keputusan | 2 | 2 % |
| Total | 100 | 100 % |

Masyarakat beranggapan merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri (Conyers, 1991). Dengan demikian mereka menyadari akan persoalan yang mereka hadapi dan juga potensi yang mereka miliki, hal ini berarti mereka bukan hanya sebagai objek pembangunan tetapi juga sebagai subjek pembangunan, tetapi dalam penelitian ini bentuk partisipasi responden dalam keterlibatan pengambilan keputusan dalam pertemuan masih terbilang rendah yaitu 2%. Hal ini belum memperlihatkan adanya suatu masyarakat yang mandiri yang mampu mengambil keputusan untuk menentukan masa depan mereka sendiri.

2. Bentuk Partisipasi Masyarakat pada Tahap Pelaksanaan

Ericson (dalam Slamet, 1994) mengatakan bahwa partisipasi di dalam tahap pelaksanaan (*implementation stage*) dimaksudkan adalah pelibatan seseorang pada tahapan pelaksanaan pekerjaan suatu proyek. Masyarakat disini dapat memberikan tenaga, uang atau pun material sebagai salah satu wujud partisipasi pada pekerjaan tersebut.

TABEL 2
BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT PADA TAHAP PELAKSANAAN

| Bentuk Partisipasi | Jumlah Responden | |
|--------------------|------------------|-------------|
| | Frekuensi | Prosentase |
| Tenaga | 68 | 68 % |
| Uang | 1 | 1 % |
| Material | 6 | 6 % |
| Pikiran | 13 | 13 % |
| Keahlian | 12 | 12 % |
| Total | 100 | 100% |

Terlepas dari bentuk partisipasi yang diberikan, pada tahap pelaksanaan ini, antusiasme warga untuk berpartisipasi sangat tinggi. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat pada saat pelaksanaan menunjukkan bahwa dana yang berasal dari bantuan langsung telah benar-benar bersifat dan berfungsi stimulan, sehingga memotivasi masyarakat semakin kuat untuk berpartisipasi, yang menurut Peter M. Blau (dalam Kusnaedi, 1995) bahwa semakin banyak manfaat yang diduga masyarakat maka semakin kuat pula masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan.

3. Bentuk Partisipasi Masyarakat pada Tahap Pengawasan
 Dengan dilakukannya perencanaan serta pelaksanaan oleh masyarakat, diharapkan pengawasan/monitoringnya pun akan dilakukan juga oleh masyarakat sehingga hasil yang diperoleh akan sesuai keinginan masyarakat. Kegiatan pada tahapan monitoring ini penting sekali untuk memandu apakah proyek tersebut sudah sesuai dengan model (*blue print*) yang telah ditetapkan (Soekartawi, 1990).

TABEL 3
BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT PADA TAHAP PENGAWASAN

| Bentuk Partisipasi | Jumlah Responden | |
|--|------------------|------------|
| | Frekuensi | Prosentase |
| Kesesuaian bentuk prasarana dengan rencana | 21 | 21 % |
| Daya guna | 17 | 17 % |
| Hasil Guna | 62 | 62 % |
| Total | 100 | 100 % |

Berdasarkan tabel diatas diperoleh informasi bahwa kesesuaian bentuk prasarana dengan rencana masih cukup rendah yaitu 21%. Penentuan jenis atau bentuk prasarana dan lokasi didasarkan pada kebutuhan masyarakat yang dihimpun dan ditetapkan melalui mekanisme yang ada pada masyarakat, namun dengan dana P4 ISDA IK yang terbatas tidak memungkinkan untuk melaksanakan semua usulan dari warga. Sehingga wajar bila ada jawaban dari responden yang merasa jenis dan lokasi parasarana yang dibangun atau diperbaiki dengan memanfaatkan dana P4 ISDA IK tidak sesuai dengan keinginan mereka. Hal ini sesuai dengan pendapat Conyers (1994) yang menyatakan bahwa memang skala prioritas masyarakat mungkin saja sangat berbeda dari skala prioritas yang dimiliki oleh perencana itu sendiri.

4. Tingkat Partisipasi Masyarakat
 Analisa tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan P4 ISDA IK bertujuan untuk mengetahui derajat keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan program. Derajat keterlibatan masyarakat tersebut diukur dari variabel-variabel tingkat kehadiran dalam rapat/pertemuan, keaktifan dalam berdiskusi dan mengemukakan pendapat, keterlibatan dalam pengambilan keputusan, serta keterlibatan dalam pelaksanaan kegiatan fisik .

TABEL 4
TINGKAT KEHADIRAN DALAM PERTEMUAN

| No | Variabel | Skala Penilaian | N | % | Bobot | N x Bobot |
|----|---------------------------|--|----|------|-------|-----------|
| 1 | Kehadiran Dalam Pertemuan | Hadir hanya untuk mendapatkan informasi | 9 | 9 % | 1 | 9 |
| | | Hadir untuk mendapatkan dan memberikan informasi | 43 | 43 % | 2 | 86 |
| | | Hadir untuk memperoleh informasi dan | 20 | 20 % | 3 | 60 |

| | | | | | |
|--------|--|------------|--------------|---|------------|
| | menyampaikan pendapat tapi tidak diperhitungkan | | | | |
| | Hadir dan memberikan pendapat namun hanya sedikit pendapat yang diperhitungkan | 22 | 22 % | 4 | 88 |
| | Hadir dan mendapat tanggung jawab yang sama | 6 | 6 % | 5 | 30 |
| | Hadir dan memiliki kekuasaan penuh | 0 | 0 % | 6 | 0 |
| Jumlah | | 100 | 100 % | | 273 |

TABEL 5
TINGKAT KEAKTIFAN DALAM BERDISKUSI DAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT

| No | Variabel | Skala Penilaian | N | % | Bobot | N x Bobot |
|--------|--|---|------------|------------|-------|------------|
| 1 | Keaktifan Dalam Berdiskusi Dan Menyampaikan Pendapat | Mendapat informasi dan tidak diberi kesempatan untuk berdiskusi | 2 | 5 % | 1 | 2 |
| | | Berdiskusi ala kadarnya | 12 | 18 % | 2 | 24 |
| | | Mendapat informasi dan boleh berdiskusi tapi hasil diskusi tidak diperhitungkan | 33 | 33 % | 3 | 99 |
| | | Aktif berdiskusi tetapi hasil diskusi hanya sedikit yang diperhitungkan | 31 | 27 % | 4 | 124 |
| | | Aktif berdiskusi dan mendapat pembagian tanggung jawab yang sama | 19 | 14 % | 5 | 95 |
| | | Aktif berdiskusi dan mampu membuat keputusan | 3 | 3 % | 6 | 18 |
| Jumlah | | | 100 | 100 | | 362 |

TABEL 6
TINGKAT KETERLIBATAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN

| No | Variabel | Skala Penilaian | N | % | Bobot | N x Bobot |
|--------|--|--|------------|------------|-------|------------|
| 1 | Keterlibatan dalam Pengambilan Keputusan | Terlibat tanpa mendapat kesempatan untuk menyampaikan Pendapat | - | - | 1 | - |
| | | Terlibat dan berkesempatan menyampaikan pendapat tapi tidak diperhitungkan | 32 | 17 % | 2 | 64 |
| | | Terlibat tetapi hanya sedikit pendapat yang diperhitungkan | 33 | 31 % | 3 | 99 |
| | | Terlibat tetapi hanya sedikit memberi pengaruh | 24 | 24 % | 4 | 96 |
| | | Terlibat dan mendapat pembagian tanggung jawab yang sama | 9 | 22 % | 5 | 45 |
| | | Terlibat dan mampu membuat keputusan | 2 | 6 % | 6 | 12 |
| Jumlah | | | 100 | 100 | | 316 |

TABEL 7
TINGKAT KETERLIBATAN DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK

| No | Variabel | Skala Penilaian | N | % | Bobot | N x Bobot |
|--------|---|---|-----|-----|-------|-----------|
| 1 | Keterlibatan dalam Pelaksanaan Kegiatan Fisik | Terlibat dalam pelaksanaan kegiatan fisik tanpa mendapat kesempatan untuk menyampaikan Pendapat | - | - | 1 | - |
| | | Terlibat dalam pelaksanaan kegiatan fisik dan berkesempatan menyampaikan pendapat tapi tidak diperhitungkan | 17 | 17% | 2 | 34 |
| | | Terlibat dalam pelaksanaan kegiatan fisik tetapi hanya sedikit pendapat yang diperhitungkan | 31 | 31% | 3 | 93 |
| | | Terlibat dalam pelaksanaan kegiatan fisik tetapi hanya sedikit memberi pengaruh | 24 | 24% | 4 | 96 |
| | | Terlibat dalam pelaksanaan kegiatan fisik dan mendapat pembagian tanggung jawab yang sama | 22 | 22% | 5 | 110 |
| | | Terlibat dalam pelaksanaan kegiatan fisik dan mampu membuat keputusan | 6 | 6% | 6 | 36 |
| Jumlah | | | 100 | 100 | | 369 |

TABEL 8
TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT SECARA KESELURUHAN

| No | Variabel | Skor |
|--------------|--|------|
| 1 | Tingkat kehadiran dalam pertemuan | 273 |
| 2 | Keaktifan dalam berdiskusi dan mengemukakan pendapat | 362 |
| 3 | Keterlibatan dalam pengambilan keputusan | 316 |
| 4 | keterlibatan dalam pelaksanaan kegiatan fisik | 369 |
| TOTAL | | 1320 |

Dari tabel-tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pertama, tingkat kehadiran dalam pertemuan memiliki skor 273. Skor ini termasuk dalam tingkat *Consultation*. Kedua, keaktifan dalam berdiskusi dan mengemukakan pendapat memperoleh skor 362, sehingga dikategorikan ke dalam tingkat *consiliation*. Ketiga, Keterlibatan dalam pengambilan keputusan memperoleh skor 316, Skor ini termasuk dalam tingkat *Consultation*. Keempat, keterlibatan dalam pelaksanaan kegiatan fisik memperoleh skor 369, sehingga dikategorikan ke dalam tingkat *consiliation*.

Setelah masing-masing variabel diketahui skornya, maka secara keseluruhan juga dapat diketahui skornya, yaitu 1320, Jumlah skor tersebut bila mengacu pada tabel 1 maka tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air di bidang Irigasi Kecil (P4 ISDA IK) adalah termasuk ke dalam tingkat *consultation* (Tangga keempat dari enam tangga Inoue). Pada tingkat *consultation* dapat diartikan bahwa masyarakat yang hadir dalam rapat/pertemuan tersebut sudah memiliki beberapa pengaruh dalam artian mereka sudah dapat menyampaikan pendapat mereka (komunikasi dua arah). Namun demikian, analisa dan pengambilan keputusan masih ditentukan oleh pihak yang memiliki kekuasaan.

Analisa Kinerja P3A Sumber Tani

1. Uji Validitas dan Reliabilitas

Sebelum dilakukan analisa kinerja P3A dengan metode Importance-Performance Analysis (IPA), dilakukan terlebih dahulu uji validitas dan reliabilitas dari jawaban kuesioner. Analisa untuk uji validitas dilakukan dengan menggunakan korelasi Pearson yaitu dengan cara menghitung koefisien korelasi antara masing-masing nilai pada nomor pertanyaan dengan nilai total dari nomor pertanyaan tersebut. Selanjutnya koefisien korelasi yang diperoleh r harus diuji signifikansinya dengan membandingkannya dengan r tabel. Bila r hitung > dari r tabel, maka nomor pertanyaan tersebut valid (Wijaya, 2011). Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan koefisien Alpha Cronbach. Wijaya (2011), mengemukakan bahwa jawaban seseorang akan cukup konsisten jika nilai koefisien alpha antara 0,64 sampai 0,90. Pendapat lain menyatakan bahwa instrument akan memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi apabila alpha lebih dari 0,60 (Ghozali, 2013). Kedua pengujian ini dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 17.

TABEL 9
HASIL UJI VALIDITAS DARI JAWABAN RESPONDEN

| Variabel | Indikator | Nilai r Hitung | |
|-------------------------------|--|---------------------|------------------|
| | | Tingkat Kepentingan | Tingkat Kepuasan |
| A. Aspek Organisasi | 1. P3A memiliki AD/ART, | 0,214 | 0,516 |
| | 2. P3A memiliki badan hukum | 0,462 | 0,557 |
| | 3. Terdapat pakta integritas dan penandatanganan kontrak | 0,488 | 0,570 |
| | 4. P3A mempunyai rencana kerja KPM | 0,487 | 0,245 |
| | 5. P3A menyelenggarakan rapat mingguan | 0,464 | 0,423 |
| B. Aspek Pengelolaan Dana | 1. Kemudahan persyaratan penerima P4 ISDA IK, | 0,478 | 0,607 |
| | 2. Kemudahan penyaluran pencairan dana | 0,550 | 0,606 |
| | 3. Pengawasan dalam hal pembiayaan, | 0,421 | 0,563 |
| | 4. Pelaporan yang dibuat oleh P3A | 0,547 | 0,440 |
| C. Aspek Pelaksanaan Kegiatan | 1. Pekerjaan persiapan, | 0,517 | 0,557 |
| | 2. Pengadaan material dan barang | 0,431 | 0,685 |
| | 3. Pengaturan tenaga kerja | 0,661 | 0,707 |
| | 4. Pengendalian waktu/ jadwal pekerjaan kerja | 0,605 | 0,644 |
| | 5. Pelaksanaan konstruksi | 0,200 | 0,444 |

TABEL 10
HASIL UJI RELIABILITAS DARI JAWABAN RESPONDEN

| No. | Data | α |
|-----|---------------------|----------|
| 1 | Tingkat Kepentingan | 0,719 |
| 2 | Tingkat Kepuasan | 0,815 |

Hasil pengujian validitas pada tabel 11 untuk masing-masing hasil pengukuran tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan terhadap seluruh pernyataan lebih besar dari r tabel pada selang kepercayaan 95 persen yaitu 0,195. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh pernyataan dalam kuisisioner adalah signifikan dan dapat dinyatakan valid dan berdasarkan sajian data pada Tabel 12 mengenai uji reliabilitas dapat dilihat bahwa indikator dalam pernyataan kuisisioner

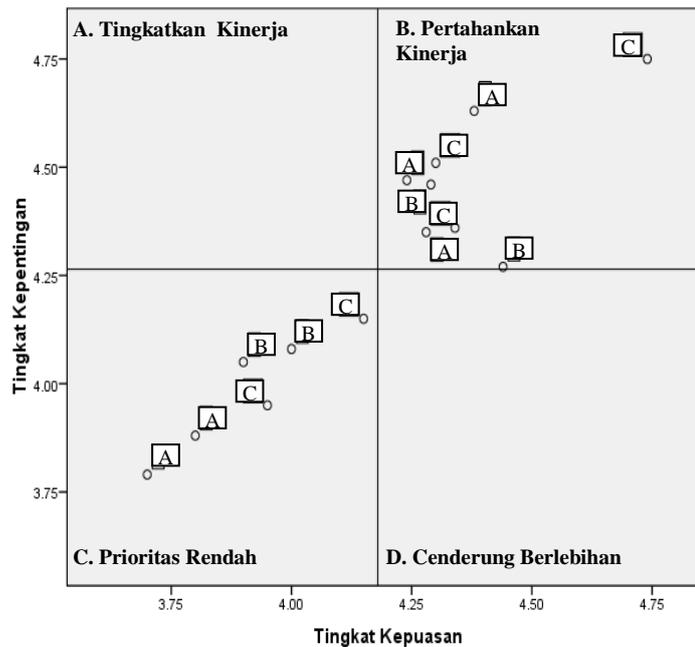
memiliki nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,719 dan 0,815 yang berarti terjadinya kesalahan ukur dalam kuesioner yang diisi oleh petani responden cenderung rendah.

2. Metode Importance Performance Analysis

IPA menyatukan pengukuran faktor tingkat kepuasan (*performance*) dan tingkat kepentingan (*importance*) yang kemudian digambarkan dalam diagram dua dimensi yaitu diagram *importance-performance* untuk mendapatkan usulan praktis dan memudahkan penjelasan data, dimana pusat pemotongan garis adalah nilai rata-rata yang terdapat pada dimensi kepentingan dan kepuasan. Grafik IPA dibagi menjadi empat buah kuadran berdasarkan hasil pengukuran *Importance-Performance Analysis*.

TABEL 11
DATA TINGKAT KEPENTINGAN DAN TINGKAT KEPUASAN RESPONDEN

| Variabel | Indikator | Tingkat Kepentingan | Tingkat Kepuasan |
|-------------------------------|--|---------------------|------------------|
| A. Aspek Organisasi | 1. P3A memiliki AD/ART | 4,63 | 4,38 |
| | 2. P3A memiliki badan hukum | 4,37 | 4,28 |
| | 3. Terdapat pakta integritas dan penandatanganan kontrak | 4,47 | 4,24 |
| | 4. P3A mempunyai rencana kerja KPM | 3,88 | 3,80 |
| | 5. P3A menyelenggarakan rapat mingguan | 3,79 | 3,70 |
| B. Aspek Pengelolaan Dana | 4. Kemudahan persyaratan penerima P4 ISDA IK, | 4,48 | 4,29 |
| | 5. Kemudahan penyaluran pencairan dana | 4,29 | 4,44 |
| | 6. Pengawasan dalam hal pembiayaan, | 4,05 | 3,90 |
| | 7. Pelaporan yang dibuat oleh P3A | 4,08 | 4,00 |
| C. Aspek Pelaksanaan Kegiatan | 1. Pekerjaan persiapan, | 4,36 | 4,34 |
| | 2. Pengadaan material dan barang | 4,51 | 4,30 |
| | 3. Pengaturan tenaga kerja | 4,15 | 4,15 |
| | 4. Pengendalian waktu/ jadwal pekerjaan kerja | 3,95 | 3,95 |
| | 5. Pelaksanaan konstruksi | 4,76 | 4,74 |
| Nilai rata-rata | | 4,27 | 4,18 |



GAMBAR 1
PEMBAGIAN KUADRAN IPA TERHADAP HASIL PENGUKURAN KINERJA

Kesesuaian Konsep dan Pelaksanaan Program

Secara umum pelaksanaan P4 ISDA IK berjalan sesuai dengan ketentuan dasar dan prinsip-prinsip P4 ISDA IK. Pertama, partisipatif, keberpihakan dan keterlibatan masyarakat tani terlihat sejak proses penggalan gagasan, penentuan usulan kegiatan, serta pelaksanaan kegiatan fisik. Kedua, transparansi, pelaksanaan seluruh kegiatan P4 ISDA IK dilakukan secara transparan atau terbuka melalui musyawarah/rapat dengan mengundang masyarakat tani sejak tahap perencanaan hingga tahap pembuatan laporan pertanggungjawaban.

Adanya keterbukaan ini dimaksudkan agar setiap pihak terkait dapat mencermati seluruh kegiatan secara mendetail. Sehingga fungsi pengawasan dan pengendalian akan berjalan secara maksimal. Ketiga, akuntabilitas, laporan pengelolaan seluruh kegiatan dibuat oleh P3A selaku penerima bantuan P4 ISDA IK dengan diketahui oleh kepala desa dan TPM, di mana dalam laporan tersebut P3A harus dapat mempertanggungjawabkan dana yang telah diterima dan dikeluarkan dari baik secara administrasi maupun pekerjaannya kepada masyarakat luas. Keempat, berkesinambungan, dengan dilibatkannya masyarakat secara aktif dalam pelaksanaan program ini maka diharapkan akan timbul kesadaran dan rasa memiliki dari masyarakat terhadap hasil program yang ada, dalam hal ini bangunan fisik yang telah dibangun melalui program P4 ISDA IK sehingga dapat dipelihara dan dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat tani selaku pengguna utama secara berkelanjutan.

Temuan Studi

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan di wilayah studi, didapatkan temuan studi yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk peningkatan pelaksanaan P4 ISDA IK yaitu Pada pelaksanaan P4 ISDA IK di Desa Kalisari dimana ditemukan bahwa bentuk partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan sebagian besar masyarakat hanya ikut dalam pertemuan namun hanya sedikit bagian yang aktif dalam memberikan usulan/saran dan ikut dalam pengambilan keputusan terkait pelaksanaan program P4 ISDA IK di desa mereka. Menurut Slamet (1994) dikemukakan bahwa, hal ini berkaitan dengan tipe kepemimpinan. Dimana tipe

kepemimpinan seperti ini masuk dalam tipe kepemimpinan yang bersifat paternalistis. Pada tipe kepemimpinan ini bahwa segalanya diserahkan kepada kehendak pimpinan. rakyat sudah menyerahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan program kepada pimpinan yang ada.

Bentuk partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan sebagian besar masyarakat memberikan tenaganya sebagai bentuk partisipasi. Berdasarkan penelitian lain yang dilakukan oleh Surotinojo (2009) juga menunjukkan bahwa tenaga merupakan bentuk partisipasi yang diberikan oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan program. Hal ini disebabkan oleh tingkat pendapatan masyarakat yang tergolong rendah dan tidak menentu, karena sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani dimana penghasilan mereka kurang dari satu juta rupiah perbulan. Sumbangan dalam bentuk tenaga ini yaitu melalui kegiatan kerja bakti sebagai pekerja bangunan. Namun tingginya tingkat partisipasi masyarakat pada saat pelaksanaan menunjukkan bahwa dana yang berasal dari bantuan langsung telah benar-benar bersifat dan berfungsi sebagai stimulan, sehingga memotivasi masyarakat semakin kuat untuk berpartisipasi.

Pada tahap pengawasan bentuk partisipasi masyarakat sebagian besar melihat pada hasil guna yaitu bagaimana apa yang mereka lakukan dapat membawa hasil sebagaimana yang mereka inginkan. Hal ini dapat diartikan bahwa kepedulian terhadap kesesuaian bentuk prasarana yang dibangun dengan rencana awal tidak terlalu dianggap penting oleh masyarakat dan mengindikasikan bahwa sebagian masyarakat hanya melihat apa yang mereka bisa dapatkan melalui program ini tanpa melihat seperti apa rencana awal yang telah mereka susun sebelumnya. Namun hal ini dapat dimaklumi karena masyarakat akan semakin aktif jika mengetahui apa yang mereka kerjakan akan memberikan manfaat yang banyak bagi mereka, yang menurut Peter M. Blau (dalam Kusnaedi, 1995) bahwa semakin banyak manfaat yang diduga masyarakat maka semakin kuat pula masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan.

Tingkat partisipasi masyarakat pada pelaksanaan P4 ISDA IK jika mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Inoue maka masuk dalam tingkat *consultation*. Pada tingkat ini dapat diketahui bahwa pemerintah telah mengundang opini masyarakat setelah diberikan informasi kepada masyarakat. Terbukti dengan dilibatkannya wakil masyarakat dalam pelaksanaan P4 ISDA IK. Pada tingkat ini telah terjadi dialog dua arah antara pemerintah dan masyarakat yang terlibat dan masyarakat memberikan masukan dan berdiskusi aktif lewat cara dialog dua arah tersebut. Namun, meskipun telah terjadi dialog dua arah, akan tetapi cara ini tingkat keberhasilannya rendah karena tidak adanya jaminan bahwa kepedulian dan ide masyarakat akan diperhatikan.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai kinerja dari P3A di Desa Kalisari selaku KPM dari program P4 ISDA IK terlihat masih terdapat atribut-atribut yang berada pada kuadran C prioritas rendah (P3A mempunyai rencana kerja KPM (A4), P3A menyelenggarakan rapat mingguan (A5), Pengawasan dalam hal pembiayaan (B3), Pelaporan yang dibuat oleh P3A (B4), Pengaturan tenaga kerja (C3), Pengendalian waktu/jadwal pekerjaan kerja (C4)).

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap atribut-atribut yang ditetapkan pada penelitian penulis masih kurang dan masyarakat masih menganggap remeh atribut-atribut yang berada pada kuadran C tersebut diatas. Sehingga masih perlunya peran pemerintah dalam melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya atribut-atribut tersebut.

KESIMPULAN

Bentuk partisipasi masyarakat yang diperlukan untuk menunjang keberlangsungan sebuah program adalah bentuk partisipasi aktif dan sebaiknya dilakukan komunikasi dua arah di semua tahapan program antara pemerintah dan masyarakat.

Tingkat partisipasi masyarakat sangat bergantung dari dukungan dan kepercayaan pemerintah terhadap kemampuan masyarakat dalam membangun lingkungan mereka. Jika pemerintah memberi kebebasan pada masyarakat untuk membuat inisiatif sendiri atau dengan bantuan pihak ketiga dalam pelaksanaan kegiatan maka tingkat partisipasi *partnership* dan *self mobilization* dapat terjadi. Namun, jika masih terdapat kontrol dari pemerintah maka tingkat partisipasi yang akan terjadi adalah tingkat *consiliation*. Sementara jika kontrol dipegang penuh oleh pemerintah maka yang terjadi adalah tingkat partisipasi *informing* dan *information gathering*. Pada tingkat *consultation* sendiri kontrol masih dipegang penuh oleh pemerintah namun masyarakat sudah mulai diajak berdiskusi dan dimintai pendapat tetapi keputusan akhir masih berada di tangan pemerintah.

| Tingkat Partisipasi | Pendekatan |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1. <i>Informing</i> | Not Supportive Government |
| 2. <i>Information gathering</i> | |
| 3. <i>Consultation</i> | Not-so-Supportive Government |
| 4. <i>Consiliation</i> | Supportive Government |
| 5. <i>Partnership</i> | |
| 6. <i>Self mobilization</i> | |

Kinerja yang diharapkan dan diperlukan dalam menunjang pelaksanaan program yaitu ketika semua indikator kinerja yang ditentukan berada pada kuadran B pada metode IPA dimana indikator-indikator yang ada dianggap penting oleh masyarakat dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap jalannya program relatif tinggi. Dalam hal ini indikator-indikator yang masih perlu ditingkatkan adalah aspek-aspek berikut: rencana kerja KPM, penyelenggaraan rapat mingguan, pengawasan dalam hal pembiayaan, pelaporan yang dibuat oleh P3A, pengaturan tenaga kerja, dan pengendalian waktu/jadwal pekerjaan kerja.

Implementasi program P4 ISDA IK secara keseluruhan sudah sesuai dengan konsep/prinsip dasar P4 ISDA IK. Namun dengan beberapa *point* peningkatan yang masih perlu dilakukan dalam pelaksanaannya seperti peran aktif masyarakat dan monitoring program.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggriani, Triane Widya. 2012. Analisis Dampak Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). Universitas Indonesia. Jakarta
- Conyers, Diana. 1991. Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar. Terjemahan Susetiawan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dunn, William N. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua: Gadjah Mada University Press.
- Inoue, Makoto. 2004. *Present Status of Local Communities in the CDM Area: Significance of Local Collaborative Forest Governance*. Kyoto Mechanism and the Conservation of Tropical Forest Ecosystem. Japan.
- Isbandi Rukminto Adi. (2007). Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan. Depok: FISIP UI Press.
- Kusnaedi. 1995. Membangun Desa : Pedoman Untuk Penggerak IDT, Mahasiswa KKN, Dan Kader Pembangunan Desa. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Pasaribu dkk. 2011. Penentuan Desa Calon Lokasi PUAP 2011 dan Evaluasi Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Kementerian Pertanian. Bogor.
- Slamet, Y. 1994. Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Soekartawi. 1990. Prinsip Dasar Perencanaan Pembangunan. Jakarta, Rajawali.
- Sumaryanto, dkk. 2006. Evaluasi Kinerja Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Dan Upaya Perbaikannya. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
- Wijaya, Toni. 2011. Manajemen Kualitas Jasa. Desain Servqual, QFD, dan Kano Disertai Contoh Aplikasi dalam Kasus Penelitian. Jakarta. PT. Indeks.
- Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Surotinojo, Ibrahim. 2009. Partisipasi Masyarakat Dalam Program Sanitasi Oleh Masyarakat (SANIMAS) Di Desa Bajo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, Gorontalo. Tesis. Universitas Diponegoro. Semarang.